



FORUM KOORDINASI STABILITAS SISTEM KEUANGAN

SIARAN PERS

No. Pers-3/ FKSSK/XII/2012

TENTANG

STABILITAS SISTEM KEUANGAN TAHUN 2012

Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo bersama Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, C. Heru Budiargo mengadakan rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) pada hari ini, Jumat, 28 Desember 2012. Rapat ini merupakan rapat yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda rapat hari ini adalah asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan 3 bulan terakhir. Asesmen dilakukan dengan melihat perkembangan ekonomi global dan dari sisi domestik kami memperhatikan makro ekonomi, pasar keuangan dan kondisi sektor perbankan.

Perkembangan ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Tren perekonomian Amerika Serikat menurun dan terdapat risiko "*Fiscal Cliff*" meskipun kesepakatan baru diperkirakan akan tercapai. Sementara negara-negara di kawasan Eropa juga masih mengalami resesi, bahkan negara-negara GIPSI terancam mengalami penurunan *rating* menuju *sub investment grade*. Demikian pula dengan negara China dan India yang turut terdampak gejolak perekonomian global sehingga pertumbuhan ekonominya tidak setinggi yang diharapkan.

Di pasar internasional, harga komoditas migas dan non migas juga terus mengalami penurunan sehingga berpengaruh juga pada ekspor impor dan neraca transaksi berjalan. Jumlah ekspor batubara dan minyak nabati mengalami penurunan meskipun volumenya meningkat, akibat turunnya harga komoditas ini. Demikian juga

dengan komoditas ekspor utama lainnya yang semua mengalami pertumbuhan negatif kecuali makanan olahan dan barang dari logam. Sementara ekspor mengalami penurunan, impor kita justru meningkat. Namun demikian, impor yang meningkat bukan lah karena peningkatan impor barang konsumsi melainkan impor bahan baku dan barang modal. Peningkatan impor kelompok bahan baku terutama karena naiknya impor suku cadang kendaraan bermotor dan pakan ternak. Sementara impor barang modal meningkat terutama karena kenaikan impor mesin untuk industri seperti mesin untuk pengerjaan plastik dan karet serta mesin industri tekstil serta impor pesawat. Kondisi ini menyebabkan defisit neraca perdagangan dimana pada kuartal keempat ini diperkirakan mencapai 2,3% thd PDB. Defisit tersebut lebih tinggi dari yang diproyeksikan (-2,2%) meskipun lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 2,4%.

Secara umum APBN masih aman, tetapi perlu diwaspadai potensi tidak tercapainya bea keluar, PPh non Migas & PNBP SDA Migas. Tidak tercapainya PPh non Migas maupun bea keluar merupakan dampak pelemahan ekonomi global yg mulai terasa di Indonesia. Di samping itu, volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan meningkat sehingga berpotensi menaikkan beban subsidi energi.

Perkembangan pasar keuangan berada pada kondisi normal baik pasar modal, pasar SUN maupun nilai tukar rupiah, meskipun pergerakannya fluktuatif akibat masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi global, lambatnya penyelesaian krisis Eropa khususnya Yunani dan sentimen terkait defisit Neraca Transaksi Berjalan. Tekanan nilai tukar Rupiah juga berada dalam koridor normal, namun demikian nilai tukar masih bergerak dalam tendensi melemah terkait masih tingginya permintaan valas korporasi dan perilaku profit taking menjelang akhir tahun.##

Dalam 3 bulan terakhir tekanan pada institusi perbankan semakin menurun dengan menurunnya NPL perbankan dari 2,17% di bulan Desember 2011 menjadi 2,15% di bulan Oktober 2012, terus meningkatnya LDR yang mencapai 84,2% di bulan Oktober 2012 (79,0% di bulan Desember 2011) dan masih tingginya CAR perbankan dimana pada bulan Oktober 2012 mencapai 17,22% meningkat dibandingkan posisi Desember 2011 yang sebesar 16,07%. Stabilitas perbankan juga semakin membaik dan berada dalam kondisi normal dan dipengaruhi pula oleh kenaikan IHSG, dan terkendalinya NPL.

Pada tanggal 31 Desember 2012, pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank akan beralih ke OJK, dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013, pengawasan perbankan akan beralih ke OJK. Untuk memastikan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berjalan secara efektif, OJK telah mempersiapkan organisasi, infrastruktur, dan sistem kerja, serta hal-hal yang diperlukan, sehingga proses pengalihan dari otoritas sebelumnya (BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia) tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK telah menempatkan penyusunan CMP dan EWS sektor jasa keuangan yang terintegrasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai prioritas utama (*quick win*) dalam program strategis, yang meliputi area pasar modal, industri keuangan non-bank, dan juga perbankan yang akan masuk dalam pengawasan OJK berikutnya. Dengan demikian, OJK akan berfungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan berperan aktif dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Berdasar asesmen yang telah dilakukan, FKSSK menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan berada pada status normal meskipun terdapat risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian.

Jakarta, 28 Desember 2012
Koordinator Sekretariat FKSSK

Bambang Brodjonegoro